

SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DENGAN
MENGUNAKAN APLIKASI SAIBA PADA KANTOR
OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**

MUTMAINNA

10573 04326 13



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2017

**PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DENGAN
MENGUNAKAN APLIKASI SAIBA PADA KANTOR
OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**

MUTMAINNA

1057 3043 2613

**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada
Jurusan Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SAIBA
PADA KANTOR OTORITAS PELABUHAN
UTAMA MAKASSAR
NAMA MAHASISWA : MUTMAINNA
NOMOR STAMBUK : 10573 04326 13
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG STUDI : STRATA SATU (S-1)
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji
Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017.

MAKASSAR, 14 Oktober 2017

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. Asdi, MM
NIDN. 0026126103

Pembimbing II

Mukminati Ridwan, SE., M.Si
NIDN. 0919017901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM. 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA
NBM.1073428

HALAMAN PENGESAHAN

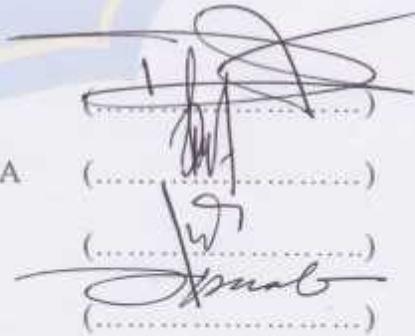
Skripsi atas Nama MUTMAINNA, NIM 10573 04326 13 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor SK Tahun 1439 H/ 2017 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017 M. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Muharram 1439 H

Makassar,

14 Oktober 2017 M.

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum: Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua: Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris: Drs. H. Sultan Sarda, SE., M.Si (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji:
 - a. Dr. Hj. Ruliaty,MM (.....)
 - b. Muchriana Muchran, SE.,M.Si. Ak., CA (.....)
 - c. Linda Arisanty, SE.,M.Si. Ak (.....)
 - d. Asriati, SE.,M.Si (.....)

MOTTO

*“Dengan ilmu hidup akan jadi lebih bermakna,
dengan seni hidup akan terasa lebih berwarna
dan dengan agama, hidup akan jadi lebih terarah”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan sebagai tanda cinta dan sayangku kepada kedua Orang tua ku, kakak dan adik ku yang telah menjadi motivasi, inspirasi serta dukungan do'anya yang tiada henti untukku.

ABSTRAK

Mutmainna, 2017. Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Dibimbing oleh Bapak Asdi dan Ibu Mukminati Ridwan, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi berbasis akruaL dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar, dengan menjaring 2 orang sebagai informan kunci sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian pada aspek pemahaman secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah menerapkan dan melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akruaL. Penerapan akuntansi berbasis akruaL dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dilakukan secara komputerisasi berjalan dengan baik dan lancar. Laporan Keuangan yang dihasilkan dengan basis akruaL memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih valid.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Basis AkruaL, dan Aplikasi SAIBA.

ABSTRACT

Mutmainna, 2017. Implementation of Accrual Based Accounting Using SAIBA Applications At the Main Port Authority of Makassar Office, Guided by Mr. Asdi and Mrs. Mukminati Ridwan, Accounting Department Faculty of Economics and Business Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study is to know how the application of accrual-based accounting by using SAIBA application at Makassar main port authority office, by capturing 2 people as key informant while data collection technique using documentation, observation and interview technique.

The method used in this research is descriptive qualitative research method that is describing the research variables on the aspects of understanding qualitatively.

The results showed that the Makassar Port Authority Office has implemented and implemented Accounting Standards Government (SAP) based on accruals. Implementation of accrual basis accounting using SAIBA application at Makassar Port Authority Authority Office, conducted by computerized running well and smoothly. The financial statements generated on an accrual basis provide better benefits to stakeholders, both the users and the auditors of financial statements, which can provide more comprehensive information, not only in the realization of the budget but also the resulting data is more valid data.

Keywords: Government Accounting Standards (SAP), Accrual Bases, and SAIBA Applications.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang sentiasa memberikan Rahmat dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir belajar dan syarat guna memperoleh derajat serjana S-1 pada program Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Dengan Menggunakan Aplikasi Saiba Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar”.

Banyak hikmah dan pengalaman berharga yang dapat menjadi pelajaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun tidak sedikit pula hambatan dan kesulitan yang penulis alami. Berkat ketabahan, kesabaran, keiklasan, kerjakeras, ketekunan serta kemauan besar yang disertai do'a dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh staf kariawan.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh staf dosen.
4. Bapak Drs. Asdi, MM., selaku pembimbing I dan Ibu Mukminati Ridwan, SE., M.Si., selaku pembimbing II yang dengan setia memberikan arahan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih tak terhingga kepada kepala pimpinan Bapak Ir. Rahmatullah, M.Si dan staf karyawan dinas perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
6. Terkhusus kepada kak Andre, kak Eko, kak Pipit dan seluruh pegawai sub bagian keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang telah membantu dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
7. Untuk keluarga besar akuntansi 7-13 yang selalu memberikan semangat dan setia bersama dalam menyelesaikan studi ini.
8. Kakakku Ishak, Ibrahim, Khumaerah, Nurhidayah, dan kedua adikku Mustakim, dan Muttahara yang selalu menyemangati ku dan mendukung ku dalam setiap langkah ku untuk menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada orang tua ku tercinta ayahanda Muh. Sabir (almarhum) dan Ibunda Naima yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keiklasan dalam mendidik dan mendo'akan ananda sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas jasa atas segala bantuan dan dorongan yang telah penulis dapatkan dari pihak-pihak tersebut diatas.

Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah SWT, tidak akan terlepas dari segala kekhilafan serta segala keterbatasan, olehnya itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Makassar, Oktober 2017

Penyusun

Mutmainna

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Akuntansi Berbasis AkruaI	7

1. Pengertian Basis AkruaI	7
2. Kelebihan Dan Kelemahan Basis AkruaI.....	7
3. Manfaat Akuntansi Berbasis AkruaI	8
4. Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI.....	9
B. Standar Akuntansi Pemerintahan	10
1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan	10
2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI	11
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI	16
C. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (Aplikasi SAIBA).....	17
D. Penelitian Terdahulu	22
E. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
B. Metode Pengumpulan Data.....	27
C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Metode Analisis	29
F. Defenisi Operasional Variabel	29
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	30
A. Sejarah Singkat Kantor Ototitas Pelabuhan Utama Makassar	30
B. Visi Dan Misi Organisasi	32
C. Struktur Organisasi	33
D. Kegiatan Usaha	34
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil penelitian.....	40
1. Data Informan Penelitian	40

2. Deskripsi Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	46
1. Penerapan Pelaporan Keuangan Dengan Menggunakan Basis Akrual Terkomputerisasi Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	46
2. Aplikasi Dalam Menyusun Laporan Keuangan Basis Akrual	49
3. Komponen Laporan Keuangan	55
BAB VI KESIMPULAN DAN PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
Riwayat Hidup	76
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel 1.	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2.	Data kunjungan Kapal (<i>Ships Call</i>) dan <i>Gross Ton</i> (GT)	35
Tabel 3.	Data Bongkar Muat Dipelabuhan Makassar	37
Tabel 4.	Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar	39
Tabel 5.	Data Informan Penelitian	40
Tabel 6.	Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	57
Tabel 7.	Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	59
Tabel 8.	Format Neraca	61
Tabel 9.	Format Laporan Operasional (LO)	62
Tabel 10.	Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	65
Tabel 11.	Format Laporan Arus Kas	67

Daftar Gambar

Gambar	Keterangan	Halaman
Gambar 1.	Kerangka Pikir.....	26
Gambar 2.	Struktur Organisasi.....	33
Gambar 3.	Tampilan Awal Pada Aplikasi SAIBA	51
Gambar 4.	Tampilan Menu Tabel Referensi	51
Gambar 5.	Tampilan Buku Besar Akrual	52
Gambar 6.	Tampilan Pada Menu Transaksi	53
Gambar 7.	Tampilan Untuk Proses Posting	53
Gambar 8.	Tampilan Untuk Menu Laporan	54
Gambar 9.	Tampilan Daftar Surat Perintah Membayar (SPM)	55

Daftar Lampiran

Lampiran	Keterangan	Halaman
Lampiran 1.	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	77
Lampiran 2.	Checklist Observasi dan Pedoman Wawancara	78
Lampiran 3.	Checklist Hasil Observasi	81
Lampiran 4.	Transkrip Wawancara.....	82
Lampiran 5.	Foto Dokumentasi.....	88
Lampiran 6.	Surat Permohonan Pengajuan Judul	91
Lampiran 7.	Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi	92
Lampiran 8.	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas	93
Lampiran 9.	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari LP3M	94
Lampiran 10.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95
Lampiran 11.	Surat Balasan Izin Penelitian Dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	96
Lampiran 12.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	97
Lampiran 13.	Buku Kontrol Bimbingan Skripsi	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam satu dasa warsa terakhir seiring dengan tuntutan akan peningkatan kualitas laporan keuangan demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai penyesuaian penatausahaan dilakukan demi mendukung perubahan tersebut. Salah satu kunci dalam perubahan tersebut adalah dikembangkannya kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat termasuk didalamnya lingkungan kementerian perhubungan, maupun pemerintah daerah.

Untuk mengelolah pemerintahan dengan baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaan keuangan. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri, serta menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan yang mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Kemudian direvisi tahun 2015, kantor instansi pemerintah mengikuti penyusunan laporan keuangan berbasis akrual diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Basis akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dianut oleh suatu entitas, yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui/dicatat dalam suatu sistem pelaporan keuangan. Secara umum terdapat dua basis akuntansi, yaitu akuntansi basis kas (*cash basis*) dan akuntansi basis akrual

(*accrual basis*) yang digunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, serta menggunakan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Akuntansi berbasis kas adalah suatu basis akuntansi yang mengakui transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya kas masuk dan kas dan kas keluar, serta diukur berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi yang mengakui, mencatat dan menyajikan transaksi serta peristiwa lainnya dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintah di Indonesia merupakan amanat undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara, sehingga basis akrual pada akhirnya diterapkan bagi seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sebagai salah satu unit pelayanan kepelabuhanan dalam lingkup kementerian perhubungan juga dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mewajibkan menyelenggarakan akuntansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 tahun 2016 juga wajib menyelenggarakan akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Unit Pemerintah yaitu dengan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan akuntansi berbasis akrual.

Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual karena ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan atau kendala. Kompleksitas akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu hal yang dapat menjadi hambatan dan menjadi salah satu alasan timbulnya penolakan terhadap perubahan basis akuntansi. Hal yang sama juga terjadi pada saat perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis kas menuju akrual pada tahun 2005 lalu. Diperlukan waktu bertahun-tahun bagi instansi pemerintah pusat untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai barisan terdepan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual telah merancang aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (aplikasi SAIBA), yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan berbasis akrual di mulai sejak bulan Januari 2015.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut maka dalam lingkungan Kementerian Perhubungan memiliki kewajiban untuk menyusun tujuh laporan keuangan, seperti : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu “Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasaar”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah : bagaimana Penerapan akuntansi berbasis akruaL dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi berbasis akruaL dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan pengembangan dan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
- b. Sebagai bahan informasi bagi pegawai sub bagian keuangan yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya dan dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Berbasis Akrua

1. Pengetian Basis Akrua

Berikut ini pengertian basis akrua sebagai berikut :

“Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Mursyidi, 61 : 2009)”.

Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling *modest*. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrua telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrua, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban (Nunuy Nur Afiah, 23 : 2010).

2. Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrua

Bastian (118-119 : 2010) menyatakan bahwa keuntungan basis akrua dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis

akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh.

- b. Basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima.
- c. Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal .

Selanjutnya Bastian (120 : 2010) menyatakan beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain :

- a. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
- b. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
- c. Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal.
- d. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

3. Manfaat Akuntansi berbasis Akrual

Secara umum, pemerintah Indonesia menerapkan basis akuntansi akrual karena basis akrual memiliki manfaat sebagai berikut (Anonim, 11 : 2014) :

- a. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.

- b. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.
- c. Bermanfaat dalam mmengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

4. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua

Langkah-langkah penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia sebagai berikut (Anonim, 12 : 2014):

- a. Menyiapkan pedoman kebijakan umum pada tingkat nasional tentang akuntansi akrual : PMK 238/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (PUSAP).
- b. Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual.
- c. Menentukan daerah percontohan di setiap regional sebagai upaya menciptakan *benchmarking*.
- d. Diseminasi/sosialisasi tingkat nasional.

Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual (*fully accrual basis*), baik dalam pengakuan pendapatan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana (Mursyidi, 61 : 2009).

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas mewajibkan laporan demikian. Basis akrual, untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca, berarti aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya kas, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (KSAP, 2012).

B. Standar Akuntansi Pemerintahan

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemda di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordriawan dkk, 120-121 : 2012).

1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

“Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (KSAP, 2012)”.

Akuntansi pemerintah di Indonesia dilandasi dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), yang disertai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), buletin teknis (bultek) dan jika memungkinkan disertai juga interpretasinya. SAP dikukuhkan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (Mursyidi, 21 : 2009).

2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa :

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (KSAP, 2012).

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam kerangka konseptualnya

menjelaskan ada dua entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada pemerintah yaitu: entitas akuntansi dan entitas pelaporan (Tanjung, 2 : 2015).

Adapun laporan keuangan dan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sebagai berikut :

Laporan keuangan pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 terdiri dari (KSAP, 2012):

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau *ful disclosure* (Anonim. 3 : 2014).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Mahsun dkk, 35-36 : 2015) :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dilakukan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan akan bercirikan memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

1) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di uji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I Standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terdiri dari (KSAP, 2012) :

- a. Lampiran I. 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- b. Lampiran I. 02. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- c. Lampiran I. 03. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- d. Lampiran I. 04. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
- e. Lampiran I. 05. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
- f. Lampiran I. 06. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
- g. Lampiran I. 07. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
- h. Lampiran I. 08. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
- i. Lampiran I. 09. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- j. Lampiran I. 10. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
- k. Lampiran I. 11. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
- l. Lampiran I. 12. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
- m. Lampiran I. 13. PSAP 12 tentang Laporan Operasional

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa : Penerapan SAP Berbasis Akrua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua (KSAP, 2012).

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas (Nordiawan dkk, 131 : 2012):

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antarunit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan

tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keteraturan dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemda dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Nordiawan dkk, 123 : 2012)

Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan (IKAPI, 12 : 2009).

C. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (aplikasi SAIBA)

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu Sistem Akuntansi Instansi menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua. Pengembangan SAI menjadi SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang diisyaratkan oleh standar akuntansi

pemerintahan (SAP). SAIBA dibangun sedemikian rupa sehingga diharapkan operator SAI (SAK dan SIMAK-BMN) tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi SAIBA (Anonim, 3 : 2014).

Berikut ini merupakan penjelasan atau uraian dari masing-masing komponen laporan keuangan pokok, sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, *surplus*/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, selain itu laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyediakan laporan secara komparatif (Anonim, 16 : 2014).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun struktur dan isi dari Laporan Perubahan SAL yaitu : saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, saldo anggaran lebih akhir (Anonim, 17 : 2014).

c. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu (Anonim, 2 : 2007). Laporan keuangan yang dimaksud menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu. Adapun struktur dan isi dari neraca yaitu : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas (Anonim, 18 : 2014).

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun struktur dan isi laporan operasional yaitu : pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, surplus/defisit-LO (Anonim, 19 : 2014).

e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Adapun struktur dan isi dari laporan perubahan ekuitas yaitu : ekuitas awal, *surplus*/defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir (Anonim, 21 : 2014).

f. Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan ekuitas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 03 Tentang Arus Kas (KSAP, 2012).

g. CaLK

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan menyajikan Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah (Anonim, 22 : 2014).

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penjelasan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.Ahdony Asfiansyah/ 2015	Strategi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota “S”)	Pengumpulan data studi kasus ini menggunakan teknik wawancara mendalam (<i>in depth interview</i>), kuesioner dan studi dokumentasi (<i>study of document</i>).	Matriks EFAS – IFAS menunjukkan bahwa factor internal (kekuatan – kelemahan) yang dimiliki oleh pemerintah kota “S”
2.Friska Langelo, dkk / 2015	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung	Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan.	Menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP No.71 tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual.

			.
3. Anggi Rizkianci / 2010	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Metode pengambilan sampel menggunakan Rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner.	Menunjukkan bahwa pelatihan, sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI.
4. Fadilah Madjid / 2016	Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI di Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros)	Model pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Penelitian survey.	Menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntansi akruaI di pemerintah daerah sudah sangat baik. Khususnya tingkat implementasi akuntansi akruaI dipengaruhi oleh ketersediaan sistem informasi serta kualitas sumber daya manusia.
5. Ida Najati, dkk / 2016	Implementasi Berbasis AkruaI : Pengujian Determinan dan	Analisis data yang digunakan dalam penelitian	Menunjukkan penggunaan aplikasi saiba tidak berpengaruh terhadap

	Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.	ini adalah second order <i>Confirmatory factor analysis</i> dengan bantuan program smartpls versi 2.0	implementasi akuntansi berbasis akrual, sedangkan budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual, selain itu implementasi akuntansi berbasis akrual mempunyai implikasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
6.Lilina Novianty Sari / 2016	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan.	Jenis data adalah data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan Rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner.	Menunjukkan bahwa komitmen, kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

E. Kerangka Pikir

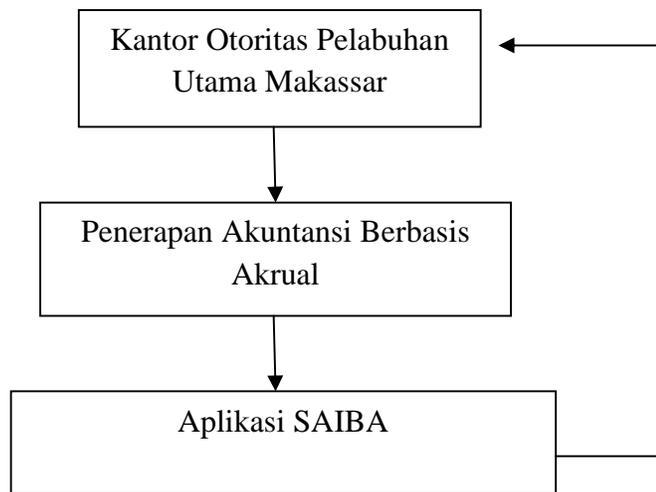
Kantor Otoritas Pelabuhan di wilayah IV Makassar ada untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan baru di pelabuhan yang merupakan amanat UU No 17/2008 tentang Pelayaran. Kantor OP di naungi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Perhubungan. Akuntansi pemerintahan sebenarnya berinduk pada kata akuntansi yang mengharuskan adanya suatu proses berupa siklus akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan, sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup pelaporan. Dalam upaya menerapkan basis akrual sistem akuntansi dimodifikasi menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (aplikasi SAIBA).

Aplikasi SAIBA merupakan *software* yang dirancang sebagai sistem akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Maka laporan keuangan aplikasi SAIBA berpedoman pada Laporan Keuangan Berbasis Akrual.

Adapun kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut :

Gambat 1.
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yakni pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Jalan Madura No.1 di kota Makassar.

Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan yaitu pada tanggal 20 April s/d 20 Mei 2017.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data dan informasi yang dianggap relevan dengan variabel penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
2. Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari pegawai sub bagian keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
3. Pengamatan (*Observation*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mengamati penerapan akuntansi berbasis akrual. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan instrumen berupa format observasi untuk mengukur bagaimana penerapan standar akuntansi berbasis akrual oleh pegawai sub bagian keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (instrumen terlampir).

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data kualitatif

Data kualitatif yaitu data yang berupa keterangan atas penjelasan dari pihak yang berwenang mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual dan data lain yang relevan dengan objek penelitian.

2. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pegawai sub bagian keuangan. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi, wawancara (*interview,*) dan pengamatan (*observation*).

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informan tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini informan yang digunakan peneliti ialah sejumlah 2 orang pegawai sub bagian keuangan yang bisa menjelaskan penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

E. Metode Analisis

Untuk membahas masalah dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskriptifkan atau mengambarkan data dan informasi tentang variabel yang di teliti. Penelitian ini menggunakan pedoman pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) dengan pegawai sub bagian keuangan (instrumen terlampir).

F. Defenisi Operasional Variabel

Penerapan akuntansi berbasis akrual adalah penerapan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayar.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Sejarah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar di mulai dari perubahan nama kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) menjadi kantor Kesyabandaran dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasaar. Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) secara resmi berganti nama menjadi Kantor Kesyabandaran Dan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan KM No. 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, PM No. 35 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja otoritas pelabuhan utama.

Pada tanggal 5 oktober 2010 di Jakarta Departemen Perhubungan secara resmi melakukan perubahan nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Selain peubahan nomenklatur, Kementerian Perhubungan juga menetapkan peningkatan kelas pada empat kantor Otoritas Pelabuhan (OP) diantaranya: pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar. Kantor kesyabandaran yang selama ini sudah ada di pelabuhan utama, menjadi kantor Otoritas Pelabuhan kelas utama dan kantor Kesyabandaran kelas utama.

Adapun tahap pengembangan periode 2013-2017 di Pelabuhan Utama Makassar sebagai berikut :

a. Pelabuhan Hatta

Meningkatkan kapasitas dan pelayanan fasilitas pelabuhan Hatta yang ada yakni berupa pembangunan perpanjangan dermaga *multi purpose* sepanjang 150m.

b. Makassar *New Port*

Merupakan proyek jangka panjang dan pada periode pengembangan ini (2013-2017) mulai dibangun Makassar *New Port* yakni berupa lahan reklamasi seluas 46 ha (disiapkan untuk dapat dibangun terminal petikemas di atasnya dengan kapasitas mencapai hingga 1.030.000 TEU's per tahun).

TEUS atau TEU (*twenty foot equivalent*) unit yang merupakan satuan terkecil dalam ukuran peti kemas.

c. Pelabuhan Soekarno

Pada periode ini di lokasi pelabuhan Soekarno akan dilakukan pengaturan kembali peruntukan lapangan dan dermaga untuk kapal Ro-Ro, general cargo, dan curah kering.

d. Pelabuhan Paotere

Pengembangan pada periode ini berupa pembangunan dermaga sepanjang 150m untuk kapal-kapal pelayaran rakyat dan juga sebagai tempat sandar untuk kapal-kapal nelayan.

B. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

“Terselenggaranya pelabuhan yang kondusif, efektif, efisiensi dan berdaya saing tinggi dalam menunjang perekonomian nasional di Era Globalisasi”

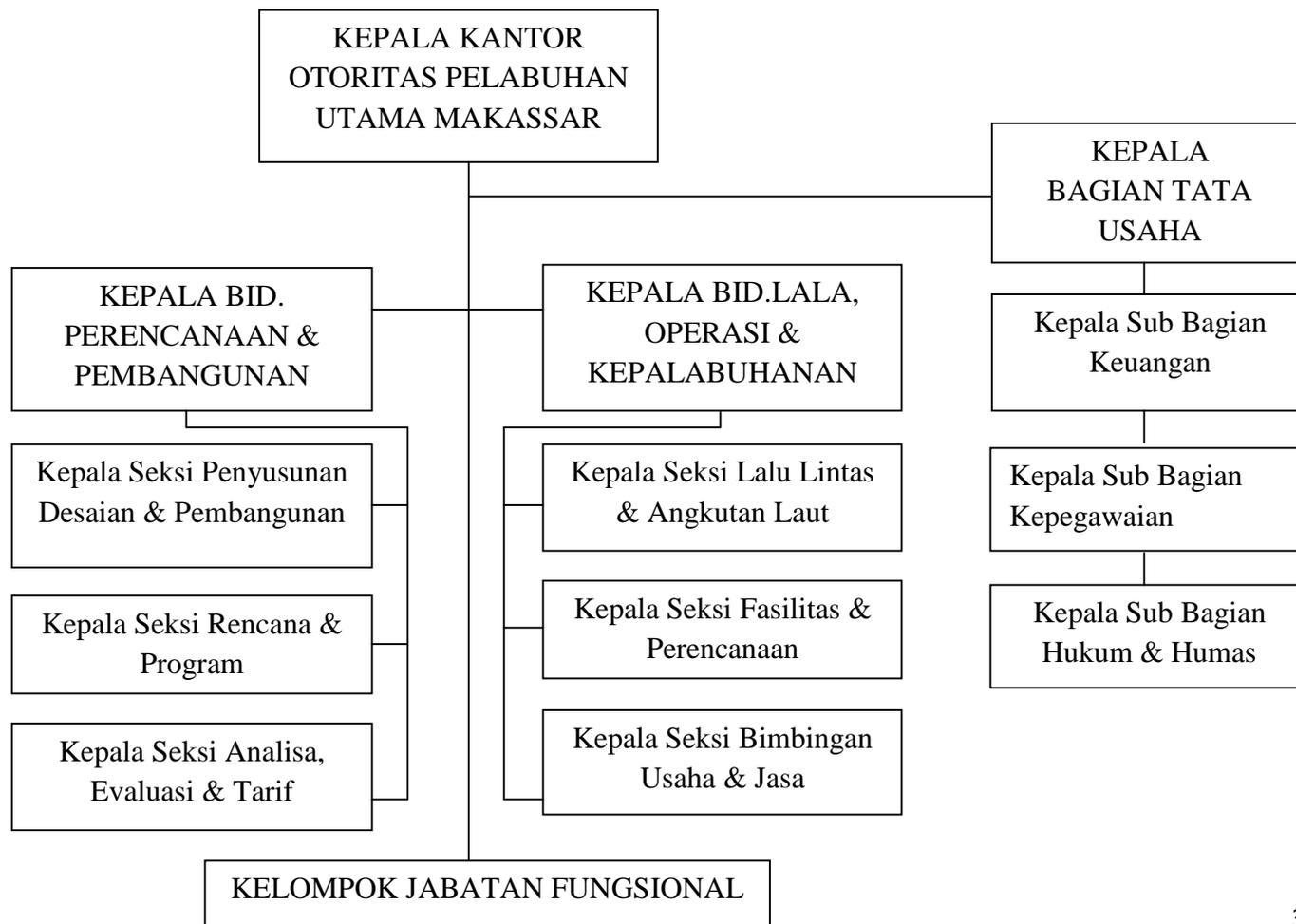
2. Misi

- a. Menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus barang serta kelestarian lingkungan pelabuhan;
- b. Mewujudkan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan sesuai dengan kondisi fasilitas terminal;
- c. Menyediakan infrastruktur pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Mewujudkan Tata Guna Lahan Daratan dan Perairan sesuai Rencana Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).

C. Struktur Organisasi

Gambar 2.

Struktur Organisasi



D. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan pelabuhan Makassar yaitu pelayanan terhadap kapal, barang, dan penumpang. Pelabuhan memberikan pelayanan terhadap kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan baik dalam negeri maupun luar negeri, kegiatan bongkar muat barang, dan melayani penumpang yang naik/turun dari kapal. Pelayanan ini dilakukan mengingat pentingnya keamanan dan ketertiban yang tentunya dirasakan oleh penumpang/masyarakat dan pihak dari pelabuhan itu sendiri.

Berikut ini uraian kegiatan usaha yang dilakukan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, sebagai berikut :

- a. Data Kunjungan Kapal (*Ships Call*) dan *Gross Ton* (GT) di Pelabuhan Utama Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)

Tabel 2.

Data kunjungan Kapal (*Ships Call*) dan *Gross Ton* (GT)

NO.	BULAN	URAIAN JENIS ANGKUTAN LAUT											
		DALAM NEGERI		LUAR NEGERI		KHUSUS		PELAYARAN RAKYAT		PERINTIS		JUMLAH	
		SHIP CALL	GT	SHIP CALL	GT	SHIP CALL	GT	SHIP CALL	GT	SHIP CALL	GT	SHIP CALL	GT
1	JANUARI	304	2.050.016	13	155.535	50	230.212	71	7.645	5	3.185	443	2.446.593
2	FEBRUARI	301	1.953.025	10	10.856	65	237.482	65	9.170	8	6.778	449	2.217.311
3	MARET	177	2.012.357	21	304.999	50	72.223	88	12.473	9	49.873	345	2.451.925
4	APRIL	255	1.832.834	12	161.422	48	193.021	61	6.316	7	4.673	383	2.198.266
5	MEI	284	1.993.091	19	338.752	46	263.224	82	8.212	9	6.583	440	2.609.862
6	JUNI	303	1.943.052	22	476.192	44	216.717	83	8.127	10	7.567	462	2.651.655
7	JULI	254	1.861.427	16	268.521	54	276.207	68	6.393	9	6.608	401	2.419.156
8	AGUSTUS	306	2.156.046	15	214.824	56	285.102	82	7.485	7	3.790	466	2.667.247
9	SEPTEMBER	310	1.987.774	18	348.999	52	279.397	68	6.393	8	4.535	456	2.627.098
10	OKTOBER	342	2.091.961	19	263.759	51	247.226	60	5.509	10	8.303	482	2.616.758
11	NOVEMBER	318	2.079.007	15	238.501	50	260.302	66	7.079	4	3.408	453	2.588.297
12	DESEMBER	325	2.406.820	20	367.828	55	271.786	61	6.614	5	4.667	466	3.057.715
	JUMLAH	3.479	24.367.410	200	3.150.188	621	2.832.899	855	91.416	91	109.970	5.246	30.551.883

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Kunjungan Kapal (*ships call*) adalah kapal yang datang di pelabuhan baik untuk berlabuh di perairan maupun bersandar di dermaga

Gross Ton (GT) adalah volume ruangan kapal dalam m kubik meliputi volume ruangan kapal kecuali tunnel (terowongan), lubang poros baling-baling, *chain locker* (tempat jangkar) dan alas ganda.

Pelayanan kapal dimulai dari kapal masuk ke perairan pelabuhan, berada di kolam pelabuhan, ketika akan bersandar di tambatan, sampai saat kapal meninggalkan pelabuhan.

b. Data Bongkar Muat di Pelabuhan Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)

Tabel 3.

Data Bongkar Muat Dipelabuhan Makassar

NO.	BULAN	URAIAN JENIS ANGKUTAN LAUT											
		DALAM NEGERI		LUAR NEGERI		KHUSUS		PELAYARAN RAKYAT		PERINTIS		JUMLAH	
		BONGKAR	MUAT	BONGKAR	MUAT	BONGKAR	MUAT	BONGKAR	MUAT	BONGKAR	MUAT	BONGKAR	MUAT
1	JANUARI	481.700	447.227	112.714	11.025	123.694	45.000	2.708	14.893	-	700	720.816	518.845
2	FEBRUARI	311.787	279.495	43.339	17.872	145.969	66.389	1.597	16.081	-	48	502.692	379.885
3	MARET	249.285	404.341	165.833	11.744	146.466	57.412	663	18.340	-	40	562.247	491.877
4	APRIL	394.326	340.499	25.320	19.815	85.900	55.417	1.070	8.490	-	200	506.616	424.421
5	MEI	628.840	316.936	54.151	20.245	148.078	70.085	694	11.285	-	200	831.763	418.751
6	JUNI	217.992	365.370	143.405	49.802	131.639	40.185	1.314	8.948	-	869	494.350	465.174
7	JULI	318.416	272.169	42.437	50.486	191.363	32.655	2.844	10.368	-	120	555.060	365.798
8	AGUSTUS	350.017	434.437	135.028	17.704	151.744	33.020	2.353	11.002	-	210	639.142	496.373
9	SEPTEMBER	287.920	419.969	129.692	31.250	156.107	50.981	2.844	10.368	-	134	576.563	512.702
10	OKTOBER	366.197	434.351	95.302	32.353	134.881	37.288	1.775	8.948	-	1.624	598.155	514.564
11	NOVEMBER	337.311	340.799	72.608	89.812	114.479	60.178	1.261	12.310	-	120	525.659	503.219
12	DESEMBER	265.813	399.434	148.680	45.234	159.409	36.007	1.080	7.687	-	29	574.982	488.391
JUMLAH		4.209.604	4.455.027	1.168.509	397.342	1.689.729	584.617	20.203	138.720	-	4.294	7.088.045	5.580.000

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Bongkar/Impor Barang adalah pembongkaran barang dari kapal, baik barang yang diangkut dari pelabuhan asal di Indonesia ataupun dari luar negeri.

Muat/Ekspor Barang adalah pemuatan barang ke kapal untuk diangkut ke pelabuhan tujuan di Indonesia atau ke luar negeri

Bongkar muat barang jenis peralatan bongkar muat yang digunakan di pelabuhan sangat tergantung kepada jenis barang yang akan dibongkar/muat.

Secara umum jenis barang dimaksud dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu: barang yang dikemas dengan petikemas, *general cargo* dan barang curah (kering/cair).

c. Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)

Tabel 4.

Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar

NO.	BULAN	CALL	KEGIATAN		JUMLAH TURUN /NAIK DALAM JIWA	KETERANGAN
			PENUMPANG TURUN	PENUMPANG NAIK		
1	JANUARI	89	24.600	28.234	52.834	
2	FEBRUARI	82	17.390	17.251	34.641	
3	MARET	72	13.534	15.225	28.759	
4	APRIL	77	15.596	11.192	26.788	
5	MEI	80	22.407	17.869	40.276	
6	JUNI	106	29.920	39.256	69.176	
7	JULI	107	37.497	48.267	85.764	
8	AGUSTUS	86	30.337	26.850	57.187	
9	SEPTEMBER	92	28.559	20.360	48.919	
10	OKTOBER	94	24.147	20.941	45.088	
11	NOVEMBER	94	20.638	16.290	36.928	
12	DESEMBER	101	27.390	21.925	49.315	
JUMLAH		1080	292.015	283.660	575.675	

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Penumpang naik adalah penumpang yang naik ke kapal untuk berangkat ke pelabuhan tujuan.

Penumpang turun adalah penumpang yang turun dari kapal yang diangkut dari pelabuhan asal.

Petugas melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, melakukan pengamanan dan pelayanan terhadap penumpang naik/turun dari kapal dengan selamat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian ini mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi saiba pada kantor otoritas pelabuhan utama makassar, dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Pada penelitian deskriptif kualitatif peneliti dituntut dapat memaparkan, menjelaskan, menggunakan dan menggali data berdasarkan apa yang di ucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan melalui tehnik pengamatan dan wawancara.

1. Data informan penelitian

Berikut ini data informan dalam penelitian yang berjumlah 2 orang.

Tabel 5.
Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Andarias Allopa, SE (An)	Pengelola Keuangan
2.	Eko Permata, SE (Eko)	Pengelola Keuangan

Berdasarkan data tabel 5 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memiliki 2 informan yang sama-sama bergerak pada bagian pengelola keuangan. Dimana kantor pemerintahan termasuk didalamnya Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar diwajibkan menerapkan akuntansi

berbasis akrual pada bidang keuangan dan penerapannya di mulai sejak tahun 2015.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berbuah keputusan penghapusan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan pada kurung waktu bulan April sampai Mei 2017. Dimana informan yang melakukan wawancara adalah pegawai sub bagian keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Adapun latar belakang pendidikan informan keduanya lulusan Sarjana Ekonomi (SE) dan kini dalam tahap menyelesaikan pendidikan S2 (tesis) disalah satu universitas di Makassar.

Berbicara mengenai pengetahuan akuntansi dan komputerisasinya tidak usah diragukan lagi selain itu keduanya sudah berkerja di bidang akuntansi ini kurang lebih 13 tahun lamanya.

Berikut ini deskripsi hasil penelitian dengan pegawai sub bagian keuangan :

a. Sistem Akuntansi Terkomputerisasi

Dalam mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan (akuntansi) proses akuntansi telah berstandar komputerisasi.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar khususnya pegawai sub bagian keuangan dalam mengerjakan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. Adapun tahap-tahap dalam proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan, dimulai dari transaksi berupa dokumen-dokumen (bukti pembayaran/sejenisnya) kemudian di perlihatkan kepada bendahara, pencairan dana dari bendahara dimuat kedalam aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPMnya jadi dilaporkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), KPPN mengeluarkan SP2D dasar SP2D itulah dibuat laporan keuangan yang di input kedalam Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (aplikasi SAIBA) (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Selain itu pegawai sub pegawai memiliki kewajiban untuk mengetahui semua aplikasi terkomputerisasi akan tetapi dalam

penggunaan komputerisasinya disesuaikan dengan tupoksi mereka masing-masing. Apabila aplikasi komputerisasi yang berkaitan dengan pelaporan berarti yang menangani pelaporan yang harus tahu mengoperasikan aplikasi akuntansi tersebut. Pegawai lain dapat mengetahuinya namun tidak diharuskan, untuk pekerjaan sudah tertupoksi artinya masing-masing pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Kantor otoritas pelabuhan utama makassar khususnya pada bidang sub bagian keuangan memiliki berapa aplikasi yang digunakan untuk mengelolah keuangan diantaranya (Wawancara terlampir, lampiran 4):

- 1) Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA),
- 2) Sistem E-monitoring (berbasis web),
- 3) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RAK-KL),
- 4) Sistem Aplikasi Satker (SAS), untuk aplikasi SAS terbagi menjadi tiga yaitu SAS SPM (Surat Perintah Membayar), SAS Bendahara Penerimaan, dan SAS Bendahara Pengeluaran.
- 5) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN),
- 6) Aplikasi PERSEDIAAN,
- 7) Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP),
- 8) Span
- 9) Simpony

b. Basis akrual

Basis akuntansi yang diterapkan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar adalah basis akrual, pegawai sub bagian keuangan sudah mengetahui bahwa saat ini basis akuntansi yang diterapkan adalah basis akrual. Perbedaan dalam hal penerapan aplikasi basis kas dan basis akrual terletak pada pengakuannya. Basis kas artinya saat transaksi uang keluar baru diakui sebagai laporan atau dengan kata lain mengakui apa yang ada pada saat itu itulah yang dilaporkan, sedangkan basis akrual peristiwa/kejadiannya baru saja terjadi sudah di akui sebagai pendapatan atau pengeluaran walaupun uang belum diterima/dibayar (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Berbicara mengenai apakah pegawai sub bagian keuangan sudah bisa membedakan antara akuntansi berbasis kas, dan akuntansi berbasis akrual. Secara keseluruhan pegawai sub bagian keuangan, ada yang tahu ada yang tidak khusus untuk pelaporan sudah tentu tahu membedakannya, yang mana basis kas dan yang mana basis akrual. Disinilah peran pemerintah menerapkan basis akrual dimana datanya lebih valid dibandingkan dengan basis kas sehingga tidak terlalu membebankan diakhir tahun (Wawancara terlampir, lampiran 4).

c. Aplikasi SAIBA

Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual) merupakan aplikasi keuangan satuan kerja yang digunakan untuk keperluan pelaporan. Dimana pegawai sub bagian keuangan telah

beberapa kali mengikuti pelatihan khusus dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA, pelatihan/bimtek sendiri pernah diadakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar di Makassar selain itu juga pernah di adakan secara besar-besaran oleh Kementerian Keuangan/Perbendaharaan di Jakarta (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Dilihat dari sisi keterampilan dan keahlian pegawai sub bagian keuangan telah memilikinya, sebab pegawai sub bagian keuangan telah ikut serta dalam pelatihan/bimtek. Selain itu juga berbekal dari aplikasi sebelumnya diterapkan (aplikasi SAKPA) yang pengoperasiannya tidak jauh berbeda dengan aplikasi yang saat ini diterapkan (aplikasi SAIBA) (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa sangat terbantu dengan perubahan basis akuntansi tersebut, karena penerapan basis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA artinya memudahkan pegawai untuk membuat/menyusun laporan keuangan. Bentuk kemudahan yang dimaksud adalah apabila kita ingin melihat laporan operasional kita bisa langsung melihatnya secara rinci bahkan jenis-jenis realisasinya LO nya berapa, akan nampak secara mendetail (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Pada intinya sistem pelaporan keuangan dengan basis akrual pada kantor Otoritas Pelabuhan berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dibenarkan oleh informan An sebagai berikut :

“Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bukti bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menerapkan basis akrual yaitu dengan di terapkan/digunakannya aplikasi SAIBA untuk pelaporan keuangan. Aplikasi SAIBA sudah berbasis akrual karena itu merupakan nama aplikasi dari suatu sistem yaitu Sistem akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) (Wawancara hari kamis tanggal 04 Mei 2017).

Hasil penelitian dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah ikut serta wacana pemerintah mengenai penerapan basis akrual. Untuk kantor instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah melaksanakan dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada kantor otoritas pelabuhan utama makassar telah berjalan dengan baik sesuai dengan imbauan pemerintah dan kapasitas yang tersedia.

B. Pembahasan

1. Penerapan Pelaporan Keuangan Dengan Menggunakan Basis Akrual Terkomputerisasi Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Perubahan peraturan perundang-undangan berakibat pada perubahan terhadap basis akuntansi yang selama ini digunakan/diterapkan. Selain mengubah basis Sistem Akuntansi Pemerintah dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut sekaligus sebagai penyesuaian terhadap dinamika pengelolaan keuangan negara yang terus berkembang.

Dengan demikian, proses implementasi akuntansi berbasis akrual yang dimulai sejak tahun 2015, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah menerapkan dan melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Berikut ini beberapa hal yang mendukung penerapan pelaporan keuangan terkomputerisasi dengan menggunakan basis akrual pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

a. Sistem Akuntansi Terkomputerisasi

Sistem akuntansi terkomputerisasi dalam hal ini sistem akuntansi didukung oleh infrastruktur yang tersedia, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk kelancaran usaha/bisnis baik untuk perusahaan, kantor dan dunia bisnis pada umumnya.

Berbicara tentang infrastruktur dalam hal ini jaringan (internet) untuk sementara bisa dikategorikan baik. Akan tetapi kalau untuk aplikasi SAIBAny sendiri, tanpa jaringan secara online juga bisa dioperasikan karena untuk pembuatan laporan keuangannya dilakukan secara komputerisasi dan bukan online. Kecuali pelaporan dengan menggunakan sistem e-monitoring memang infrastruktur itulah yang dibutuhkan karena berbasis web/internet (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Selain infrastruktur jaringan, ada juga infrastruktur teknologi informasi (TI). Untuk yang satu ini tergantung pada komputernya, kalau komputernya baik maka bisa dikatakan baik. Untuk aplikasi

SAIBA di instal manual di komputer dan tidak ter-link ke web/internet. Aplikasi SAIBA merupakan aplikasi pengembangan dari aplikasi SAKPA yang dikembangkan oleh Kementerian keuangan. Akselerasi sosialisasi dilakukan oleh KPPN kepada seluruh kantor instansi pemerintah dan pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan langsung ke Kementerian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA, dilakukan secara komputerisasi berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sistem akuntansi yang digunakan yaitu aplikasi SAIBA yang mana telah digunakan dan dipakai secara maksimal sesuai dengan tujuan akhirnya yaitu pelaporan keuangan berbasis akrual (Wawancara terlampir, lampiran 4).

b. Akuntansi Sumber Daya Manusia (SDM Akuntansi)

Akuntansi sumber daya manusia (SDM Akuntansi) berarti akuntansi untuk manusia sebagai suatu sumber daya organisasional. Hal ini melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh kantor instansi pemerintahan/perusahaan dan organisasi lainnya untuk merekrut, menyeleksi, mempekerjakan, melatih dan mengembangkan aktiva manusia. Akuntansi sumber daya manusia juga melibatkan pengukuran terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk menggantikan sumber daya manusia dari suatu organisasi.

Berbicara tentang akuntansi sumber daya manusia berarti berbicara tentang partisipasi yang dilakukan oleh pegawai sub bagian keuangan mengenai penggunaan aplikasi berbasis akrual, bentuk partisipasi yang dilakukan mengenai penggunaan aplikasi berbasis akrual yaitu aplikasi SAIBA, telah pakai secara full dan semaksimal mungkin sebab untuk kembali menggunakan basis kas, aplikasi tersebut (SAKPA) sudah tidak ada tersedia (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Laporan Keuangan yang dihasilkan dengan basis akrual memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih valid. Mengapa dikatakan valid karena datanya benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Aplikasi Dalam Menyusun Laporan Keuangan Basis Akrual

Sebagaimana penyusunan laporan keuangan sampai dengan tahun 2014 yang berbasis kas menuju akrual, penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komputer yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2015, sistem yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual tetap menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA).

Pada dasarnya aplikasi SAIBA adalah pengembangan dari aplikasi SAKPA. Pengembangan yang dilakukan adalah:

- a. Sesuai dengan komponen laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan basis akrual, maka Aplikasi SAIBA dapat menghasilkan LO dan LPE, selain menghasilkan LRA dan Neraca.
- b. Dalam rangka menghasilkan laporan-laporan tersebut, maka dalam aplikasi SAIBA terdapat tambahan menu transaksi, yaitu menu Jurnal Penyesuaian. Menu ini digunakan untuk meng-*input* transaksi-transaksi yang melibatkan akun-akun akrual, seperti: pendapatan diterima dimuka; pendapatan yang masih harus diterima; beban dibayar dimuka; beban yang masih harus dibayar; beban persediaan; beban penyisihan piutang; dan beban penyusutan.

Sedangkan tata cara penggunaan aplikasi SAIBA pada dasarnya sama dengan aplikasi SAKPA, yaitu: *Input* dokumen sumber (DIPA, Revisi DIPA, SPM, SP2D, SSBP dan SSPB), *Input* jurnal Neraca, *Input* Jurnal Penyesuaian, *Posting*, Cetak Laporan-Laporan.

Perihal penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan dapat dikategorikan baik. Selain itu selama mengoperasikan aplikasi basis akrual tersebut pegawai sub bagian keuangan tidak menemui kendala yang berarti.

Berikut ini adalah tampilan pada aplikasi SAIBA, sebagai berikut :

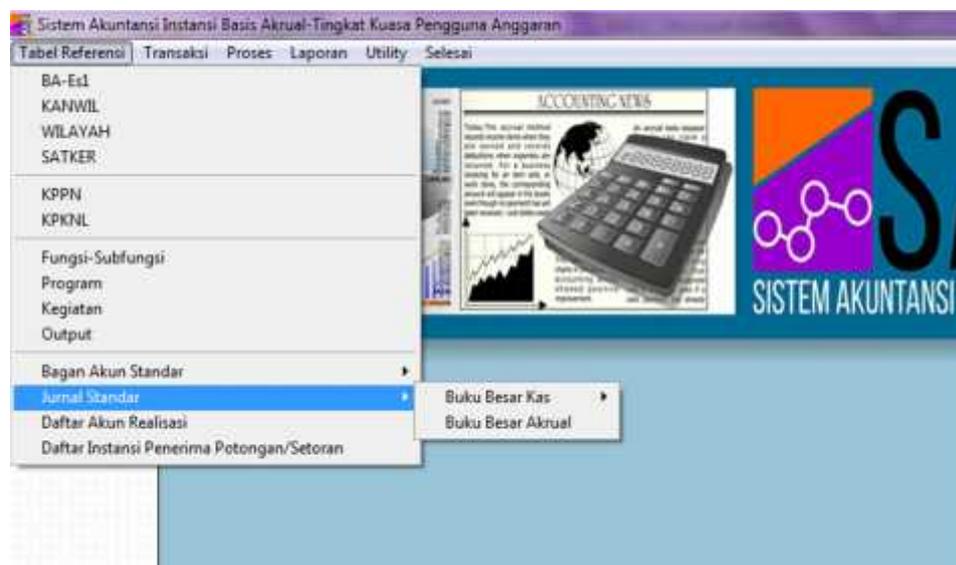
Gambar 3.

Tampilan Awal Pada Aplikasi SAIBA



Gambar 4.

Tampilan Menu Tabel Referensi



Tabel Referensi digunakan untuk menampilkan kode-- kode dalam tabel secara keseluruhan yang ada dalam sub menu beserta uraian dari kode- kode tabel yang dimaksud. Dalam Tabel Referensi ini juga dapat dicari kode dan uraian tertentu dengan mengetik seluruh atau sebagian dari uraian yang dimaksudkan.

Gambar 5.

Tampilan Buku Besar Akrual

Kd. MAKMAP	D-K	Akun	Uraian Akun	Kd-Trm	Kd-Kem
411111	D	313121	Diberima dari Entitas Lain	3	0
411111	K	411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	3	0
411111	K	411111	Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi	3	0
411111	D	411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	3	1
411111	D	411111	Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi	3	1
411111	K	313121	Diberima dari Entitas Lain	3	1
411112	D	313121	Diberima dari Entitas Lain	3	0
411112	K	411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	3	0
411112	K	411112	Pengembalian Pendapatan PPh Gas Bumi	3	0
411112	D	411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	3	1
411112	D	411112	Pengembalian Pendapatan PPh Gas Bumi	3	1
411112	K	313121	Diberima dari Entitas Lain	3	1
411119	D	313121	Diberima dari Entitas Lain	3	0

Untuk buku besar akrual yang dibaca hanya nomor SP2D jadi tidak perlu menjurnal lagi karena otomatis terbentuk. Untuk penerapannya sendiri pada buku besar akrual debit yang langsung menilai sesuai SP2D yang dibebankan.

Gambar 6.
Tampilan Pada Menu Transaksi

Tabel Referensi	Transaksi	Terima SKPA	Proses	Rekonsiliasi BMN	Laporan	Utility	Selesai
	Copy DIPA dari Aplikasi SPM						
	Daftar DIPA						
	Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SPM						
	Daftar Revisi DIPA						
	Estimasi Pendapatan						
	DIPA LUNCURAN						
	DIPA STIMULUS						
	REVISI DIPA STIMULUS						
	Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SPM						
	Daftar SPM dan SP2D						
	Daftar SP3B dan SP2B-BLU						
	Daftar SP2HL dan SPHL						
	Daftar SP4HL dan SP3HL						
	Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS						
	Pendapatan						
	Pengembalian Belanja						
	Perekaman SSP (Bendahara)						
	Jurnal Reklasifikasi Neraca						
	Jurnal Penyesuaian						
	Jurnal Koreksi						

Gambar 7.
Tampilan Untuk Proses Posting

PROSES | **PROSES Posting** | **SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BASIS AKRUAL**

Periode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluar

Informasi

Periode Posting	Periode Posting
DIPA	000000 record
DIPA Luncuran	000000 record
SKPA	0 record
Revisi DIPA	000000 record
Estimasi Pendapatan	000000 record
SPM/SP2D	000000 lembar
Penerimaan	000000 record
Jurnal Neraca	000000 record
Data SABMN	000000 record
Koreksi	0 record

Hasil Posting

PERIODE Jurnal

Proses Posting dilakukan untuk memindahkan transaksi yang telah tercatat dan benar ke Buku Besar. Proses posting ini dilakukan setiap bulan. Jika terdapat perubahan transaksi pada bulan yang telah dilakukan proses posting, maka transaksi pada bulan tersebut harus dilakukan posting ulang.

Gambar 8.

Tampilan Untuk Menu Laporan



Pada masing-masing menu laporan akan diminta mengisikan format dari jenis laporan yang akan dicetak.

Gambar 9.
Tampilan Daftar Surat Perintah Membayar (SPM)



No. SPM	Tgl. SPM	No. SP2D	Tgl. SP2D	Thn. Ang	Register	KPPN	Cr. Svc	Br. PK	Jan. 3
00001	06-01-2015	900001B	06-01-2015	2015	00000000	014	2	02	4
00002	06-01-2015	900002B	08-01-2015	2015	00000000	014	2	51	1
00003	13-01-2015	900003B	14-01-2015	2015	00000000	014	2	52	1
00004	13-01-2015	900004B	14-01-2015	2015	00000000	014	2	52	1
00006	20-01-2015	900006B	20-01-2015	2015	00000000	014	2	52	1
00005	01-02-2015	900005B	01-02-2015	2015	00000000	014	2	51	1
00007	01-04-2015	900007B	01-04-2015	2015	00000000	014	2	53	1
00008	05-12-2015	900008B	05-12-2015	2015	00000000	014	2	51	1
00009	21-12-2015	900009B	21-12-2015	2015	00000000	014	5	52	1

Daftar SPM digunakan untuk menampilkan daftar SPM yang ada untuk Satker yang bersangkutan.

Demikianlah beberapa jenis tampilan aplikasi SAIBA dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

3. Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

Tabel 6.

Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	xxx	xxx	xxx	xxx
	a. Penerimaan Perpajakan	xxx	xxx	xxx	xxx
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
	2. HIBAH	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	xxx	xxx	xxx	xxx
B	BELANJA				
	Belanja pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pembiayaan Bunga Utang	xxx	xxx	xxx	xxx
	Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
	Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Bantuan Sosial	xxxx	xxx	xxx	xxx

	Belanja Lain-Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	xxx	xxx	xxx	xxx
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	xxx	xxx	xxx	xxx
	a. Perbankan Dalam Negeri (Neto)	xxx	xxx	xxx	xxx
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	xxx	xxx	xxx	xxx
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	xxx	xxx	xxx	xxx
	a. Penanaman Pinjaman Luar Negeri				
	b. Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1+ C.2)	xxx	xxx	xxx	xxx

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

LP-SAL menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Tabel 7.

Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

No	Uraian	20xx	20xx
1	Saldo anggarean lebih awa	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1-2)	xxx	xxx
4	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3+4)	xxx	xxx
6	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo anggaran lebih akhir (5+6+7)	xxx	xxx

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aset

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

2) Kewajiban

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 8.
Format Neraca
NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas Di Bendahara Penerimaan	xxx
Piutang Bukan Pajak	xxx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Pitang Bukan Pajak	xxx
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	xxx
Persediaan	xxx
JUMLAH ASET LANCAR	xxx
ASET TETAP	
Peralatan Dan Mesin	xxx
Gedung Dan Bangunan	xxx
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx
Akuntansi Penyusutan	(xxx)
JUMLAH ASET TETAP	xxx
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	xxx
Aset Lain-Lain	xxx
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	xxx
JUMLAH ASET LAINNYA	xxx
JUMLAH ASET	xxx
EKUITAS	

EKUITAS	
Ekuitas	xxx
JUMLAH EKUITAS	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx

d. Laporan Operasional (LO)

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Tabel 9.

Format Laporan Operasional (LO)

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Dan Penjualan Barang Mewah	xxx
Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan	xxx
Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	xxx

Pendapatan Cukai	XXX
Pendapatan Pajak Lainnya	XXX
Pendapatan Bea Masuk	XXX
Pendapatan Bea Keluar	XXX
Jumlah Pendapatan Perpajakan	XXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	XXX
Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba	XXX
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	XXX
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	XXX
Jumlah Pendapatan Hibah	XXX
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	XXX
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	XXX
Beban Persediaan	XXX
Beban Barang Dan Jasa	XXX
Beban Pemeliharaan	XXX
Beban Perjalanan Dinas	XXX
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	XXX
Beban Bunga	XXX
Beban Subsidi	XXX
Beban Hibah	XXX
Beban Bantuan Sosial	XXX
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	XXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXX
Beban Transfer	XXX
Beban Lain-Lain	XXX
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	XXX
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXX
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	XXX
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	XXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	XXX
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	XXX
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	XXX
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian	

Jangka Panjang	xxx
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	xxx
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx
Beban Dari Kegiatan Non Operasional	xxx
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL POS LUAR BIASA	xxx
Beban Luar Biasa	
SURPLUS/(DESIFIT) DARI POS LUAR BIASA	xxx
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	xxx

e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Tabel 10.
 Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

URAIAN	JUMLAH
1	2
EKUITAS AWAL	xxx
SURPLUS/DEFISIT- LO	xxx
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	xxx
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	
Penyesuaian Nilai Aset	xxx
Koreksi Nilai Persediaan	xxx
Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
Koreksi Lain-Lain	xxx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxx
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	xxx
EKUITAS AKHIR	xxx

f. Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Tabel 11.

Format Laporan Arus Kas

PER 31 DESEMBER 2015-2016

(DALAM RUPIAH)

No	Uraian	2015	2016
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Penghasilan	xxx	xxx
4	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx
5	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Penerimaan	xxx	xxx
6	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx
7	Penerimaan Cukai	xxx	xxx
8	Penerimaan Pajak Lainnya	xxx	xxx
9	Penerimaan Bea Masuk	xxx	xxx
10	Penerimaan Pajak Ekspor	xxx	xxx
11	Penerimaan Sumber Daya Alam	xxx	xxx
12	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	xxx	xxx
13	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx
14	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)	xxx	xxx
17	Arus Keluar Kas		
18	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
19	Pembayaran Barang	xxx	xxx
20	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
21	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
22	Pembayaran Bantuan Sosial	xxx	xxx
23	Pembayaran Hibah	xxx	xxx
24	Pembayaran Lain-lain	xxx	xxx
25	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
26	Pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
27	Pembayaran Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
28	Pembayaran Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
29	Pembayaran Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
30	Pembayaran Dana Penyesuaian	xxx	xxx
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
32	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 31)	xxx	xxx
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 32)		
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		

35	Arus Masuk Kas		
36	Penjualan atas Tanah		
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
42	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	xxx	xxx
44	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43)	xxx	xxx
45	Arus Keluar Kas	xxx	xxx
46	Perolehan Tanah		
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
51	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
52	Pengeluaran Penyertaan Modal Negara	xxx	xxx
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	xxx	xxx
54	Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 53)	xxx	xxx
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44 - 54)	xxx	xxx
56	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
57	Arus Masuk Kas	xxx	xxx
58	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		
59	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
60	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx
61	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Daerah	xxx	xxx
63	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
65	Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 64)	xxx	xxx
66	Arus Keluar Kas	xxx	xxx
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx
71	Pemberian Pinjaman kepada Daerah	xxx	xxx
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx

74	Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 73)	xxx	xxx
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 74)	xxx	xxx
76	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	xxx	xxx
77	Arus Masuk Kas		
78	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
79	Kiriman Uang Masuk	xxx	xxx
80	Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 79)	xxx	xxx
81	Arus Keluar Kas	xxx	xxx
82	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
83	Kiriman Uang Keluar	xxx	xxx
84	Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 83)	xxx	xxx
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (80 - 84)	xxx	xxx
86	Kenaikan/Penurunan Kas (33+55+75+85)	xxx	xxx
87	Saldo Awal Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
88	Saldo Akhir Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran (86+87)	xxx	xxx
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Tujuan penyajian CaLK adalah untuk meningkatkan transparansi laporan. CaLK meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan dalam menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

CaLK mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berbicara mengenai akuntansi berbasis akrual, sebenarnya hanya terletak pada pengakuannya saja. Akuntansi berbasis akrual belum diterima/dibayarkan telah diakui sebagai pendapatan/pengeluaran tetapi rata-rata untuk kantor instansi pemerintahan sudah terjadi transaksi/terbayarkan barulah kemudian di input kedalam aplikasi basis akrual (SAIBA). Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan akuntansi berbasis kas. Hanya saja untuk basis akrual lebih spesifik, lebih lengkap, dan memudahkan untuk para pengguna aplikasi karena data yang dihasilkan merupakan data yang lebih valid. Kata valid disini diartikan bahwa datanya benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Bukan hanya itu dalam aplikasi basis akrual sudah tersedia akun-akun tersendiri dan penginputannya tinggal disesuaikan dengan akun-akun yang tersedia dalam aplikasi tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah menerapkan dan melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.
2. Penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dilakukan secara komputerisasi berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sistem akuntansi yang digunakan yaitu aplikasi SAIBA telah digunakan dan dipakai secara maksimal sesuai dengan tujuan akhirnya yaitu pelaporan keuangan berbasis akrual.
3. Laporan Keuangan yang dihasilkan dengan basis akrual memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang valid artinya datanya benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa saran dari peneliti yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang telah berjalan sejak tahun 2015, disarankan kepada kantor otoritas pelabuhan utama makassar khususnya sub bagian keuangan yaitu perlu adanya upaya akselerasi penyebar luasan informasi tentang sistem informasi akuntansi berbasis akrual kepada seluruh pegawai sub keuangan sehingga nantinya bukan hanya satu atau dua orang saja yang mengetahui dan mampu menjalankan sistem/aplikasi tersebut namun seluruh pegawai sub bagian keuangan.
2. Selain itu diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman akan setiap sistem yang digunakan atau diterapkan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar melalui proses pelatihan/diklat/bimtek agar dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan bukan hanya pada sub bagian keuangan tetapi juga pada bagian lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. *Modul Bimbingan Teknis Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tingkat Kantor Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan*. Jakarta : Kementerian Perhubungan RI.
- Anggi Rizkianci. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Keayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Umrah, hal 1-25.
- Asfiansyah, Ahdony. 2015. *Strategi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota "S")*. Jurnal NeO-Bis, Vol. 9, No. 1, hal.1-19.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Ida Najati, dkk. 2016. *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual : Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 14, No. 1, hal.1-18.
- IKAPI. 2009. *Standar Akuntansi Pemerintahan : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*. Bandung : Fokusmedia.
- KSAP. 2007. *Buku Peraturan : Buletin Teknis Nomor 01 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat*. Jakarta : KSAP.
- KSAP. 2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Jakarta : Salemba Empat.
- Langelo, Friska, dkk. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 Vol. 3, No. 1, hal. 1-8.
- Lilina Novianty Sari. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan*. Jurnal Umrah, hal 1-25.

- Madjid, Fadhilah. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros)*. Skripsi. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Mahsun, dkk. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Kelima. Yogyakarta : Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung : PT Refika Aditama.
- Nunuy Nur Afiah. 2010. *Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Untuk SKPD*. Cetakan Kesatu. Bandung : Alfabeta.

RIWAYAT HIDUP



Mutmainna, lahir di Lacio pada tanggal 14 Oktober 1994, penulis adalah anak kelima dari tujuh bersaudara, buah kasih dari ayahanda Muh. Sabir (almarhum) dan ibunda Naima. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2001 di SDN 2 Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dan tamat pada tahun 2007.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Campalagian Polewali Mandar dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di MAN Polman Kabupaten Polewali Mandar dan berhasil lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis diterima melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	Aplikasi SAIBA	Penerapan Aplikasi SAIBA Sistem akuntansi terkomputerisasi SDM Akuntansi

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	SDM Akuntansi	Telah melakukan pelatihan Sudah memiliki keterampilan dan keahlian

Lampiran 2

Checklist Observasi

Petunjuk : Beri tanda checklist () pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil pengamatan sesuai dengan option jawaban :

No	Variabel	Implementasi	
		Baik	Kurang Baik
1.	Bagaimana infrastruktur jaringan pada kantor OP, apakah bisa dikategorikan baik ?		
2.	Bagaimana infrastruktur teknologi informasi yang tersedia, apakah memungkinkan untuk menerapkan basis akrual ?		
3.	Sejauhmana sistem akuntansi komputersasi yang digunakan, perihal penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?		
4.	Sejauhmana penggunaan aplikasi yang digunakan untuk mengelolah keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?		
5.	Sejauhmana proses akuntansi dalam mengerjakan laporan keuangan sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan ?		
6.	Sampai saat ini sejauhmana tingkat pemahaman pegawai sub bagian keuangan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual ?		
7.	Bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh pegawai sub bagian keuangan mengenai penggunaan aplikasi berbasis akrual ?		
8.	Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang saat ini dilakukan, apakah merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual ?		
9.	Sejauhmana tingkat pelatihan yang telah dilakukan oleh pegawai mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya penggunaan aplikasi SAIBA ?		

10.	Bagaimana tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai sub bagian keuangan dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA, sudah sejalan dengan prosedur yang ada ?		
-----	---	--	--

Pedoman Wawancara

Pertanyaan wawancara :

1. Apakah pegawai sub bagian keuangan dalam mengerjakan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi ?
Jawaban :
2. Apakah seluruh pegawai sub bagian keuangan diwajibkan untuk mampu mengoperasikan jenis aplikasi terkomputerisasi pada Kantor OP ?
Jawaban :
3. Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah mengetahui betul mengenai basis akrual apa yang diterapkan pada kantor OP ?
Jawaban :
4. Ada berapa aplikasi yang digunakan untuk mengelolah keuangan pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar ?
Jawaban :
5. Dalam penggunaan aplikasi yang dikatakan sebelumnya, apakah pegawai sub bagian keuangan mengetahui aplikasi-aplikasi apa yang dimaksud tersebut ?
Jawaban :
6. Apa perbedaan aplikasi basis akrual yang diterapkan saat ini dengan aplikasi yang diterapkan sebelumnya ?
Jawaban :
7. Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah tahu dan bisa membedakan antara akuntansi konvensional, akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual ?
Jawaban :

8. Apakah pegawai sub bagian keuangan telah mengikuti pelatihan khusus dalam mengoprasian aplikasi SAIBA ?

Jawaban :

9. Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA ?

Jawaban :

10. Apakah sub bagian keuangan merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA ?

Jawaban :

Lampiran 3

Hasil Observasi

Petunjuk : Beri tanda checklist () pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil pengamatan sesuai dengan option jawaban :

No	Variabel	Implementasi	
		Baik	Kurang Baik
1.	Bagaimana infrastruktur jaringan pada kantor OP, apakah bisa dikategorikan baik ?		
2.	Bagaimana infrastruktur teknologi informasi yang tersedia, apakah memungkinkan untuk menerapkan basis akrual ?		
3.	Sejauhmana sistem komputersasi yang digunakan, perihal penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?		
4.	Sejauhmana penggunaan aplikasi yang digunakan untuk mengelolah keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?		
5..	Sejauhmana proses akuntansi dalam mengerjakan laporan keuangan sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan ?		
6.	Sampai saat ini sejauhmana tingkat pemahaman pegawai sub bagian keuangan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual ?		
7.	Bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh pegawai sub bagian keuangan mengenai penggunaan aplikasi berbasis akrual ?		
8.	Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang saat ini dilakukan, apakah merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual ?		
9.	Sejauhmana tingkat pelatihan yang telah dilakukan oleh pegawai mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya penggunaan aplikasi SAIBA ?		
10.	Bagaimana tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai sub bagian keuangan dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA, sudah sejalan dengan prosedur yang ada ?		

Lampiran 4

Transkrip Wawancara antara Peneliti (Mu) dengan Informan (An) Hari Kamis Tanggal 04 Mei 2017
Mu : <i>Selamat siang pak maaf mengganggu waktunya sebentar ?</i>
An : Siang, iya ada apa yah ?
Mu : <i>Saya Mutmainna mahasiswa unismuh yang sedang melakukan penelitian di sini membutuhkan informasi dari bapak terkait penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada kantor ini pak?</i>
An : oh iya, informasi yang seperti apa ya ?
Mu : <i>Begini pak, apakah pegawai pada kantor ini dalam mengerjakan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi ?</i>
An : Iya, dilakukan secara komputerisasi.
Mu : <i>Terus pak, proses dari awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan pasti melalui beberapa tahap. Bisa bapak jelaskan secara singkat saja ?</i>
An : Tahap-tahap dalam proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yaitu dimulai dari transaksi. Untuk laporan transaksi itu diambil dari data SPM atau realisasi SP2D tapi sebelum itu data SPM memiliki dokumen-dokumen kemudian dibuatkan SPM setelah dibuatkan SPM dimasukkan ke KPPN. KPPN mengeluarkan SP2D dasar SP2D itulah dibuat laporan keuangan yang di input kedalam aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual).
Mu : <i>Apakah seluruh pegawai sub bagian keuangan diwajibkan untuk mampu mengoperasikan semua jenis aplikasi terkomputerisasi pada Kantor Otoritas Pelabuhan ?</i>
An : Khusus di keuangan atau gimana ?

Mu : *Di keuangan pak.*

An : Kalau dikeuangan semua wajib tahu, akan tetapi dalam penggunaan komputerisasi di sesuaikan dengan tupoksi mereka. Apabila aplikasi komputerisasi yang berkaitan dengan pelaporan berarti yang menangani pelaporan dan memegang aplikasi akuntansi wajib tahu mengoprasikannya. Kalau berkaitan dengan bendahara berarti aplikasi yang SASnya penerima khusus penerima yang harus tahu mengeprasikan aplikasi tersebut. Tidak secara keseluruhan pegawai harus mahir mengoprasikan aplikasi itu, anggaplah dari pegawai keuangannya 11 orang kemudian ada sekitar 10 aplikasi tidak semua yang pegang mengetahui keseluruhan aplikasi itu karena spesifik masing-masing sesuai dengan tupoksi. Contohnya BMN, berarti SIMAK-BMN harus mutlak tahu. Kami bisa tahu namun tidak diharuskan sebenarnya lebih bagus lagi kalau tahu karena kan sudah ter tupoksi artinya masing-masing pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing makanya ada uraian tugas.

Mu : *Kalau bapak sendiri ?*

An : Saya menggunakan aplikasi SAIBA karena berhubungan dengan tupoksi saya dan juga E-monitoring karena berhubungan dengan tupoksi saya juga. Contohnya SAIBA saya bertanggung jawab penuh dengan pelaporan SAIBA.

Mu : *Kalau begitu, apakah bapak tidak kewalahan untuk mengelola aplikasi itu seorang diri*

An : Bila ditanya mengenai kewalahan atau tidak sebenarnya itu kembali ke personal masing-masing dan juga kenapa kita kewalahan karena itu sudah menjadi tugas selain tergantung bagaimana kita menyikapinya tidak bisa dipungkiri dalam bekerja pasti ada kendala/masalah akan tetapi masalah bukanlah sesuatu yang harus dihindari pasti ada jalan/solusi kalau berbicara tentang beban sebenarnya itu bukan beban karena itu sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawab kita.

Mu : *Ada berapa aplikasi yang gunakan untuk mengelolah keuangan pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar ?*

<p>An : Untuk pelaporan ada banyak aplikasi, baru membuat penganggaran sudah ada namanya yaitu aplikasi RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Lembaga/Kementerian) aplikasi saat penyusunan anggaran. Aplikasi anggaran pengeluaran namanya SAS (Sistem Akuntansi Satker) kemudian di SAS ada bendahara pengeluaran dan bendahara penerima ada SAS SPM. Ada SPAN selain itu ada juga aplikasi BMN yaitu SIMAK-BMN, ada aplikasi persediaan, dipelaporan ada SAIBA, sistem E-monitoring (online ke kementerian keuangan) sistem E-monitoring ada tiga, diantaranya : sistem E-monitoring pertanggung jawaban dokumen pilihan, SMART ke kementerian keuangan dan PP39 yang tahun 2016 untuk pelaporan ke Badan perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Khusus aplikasi pembuatan gaji namanya aplikasi GPP.</p>
<p>Mu : <i>Dalam penggunaan aplikasi yang dikatakan sebelumnya, apakah pegawai sub bagian keuangan mengetahui aplikasi-aplikasi apa yang dimaksud tersebut ?</i></p>
<p>An : Iya, kami sudah tahu sebab aplikasi itu kami yang kelola dan kami tahu betul aplikasi yang dikatakan sebelumnya.</p>
<p>Mu : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah mengetahui betul mengenai basis akrual apa yang diterapkan pada kantor OP ?</i></p>
<p>An : Untuk pegawai keuangan mungkin secara pintas tahu bahwa sekarang kita sudah menerapkan akuntansi basis akrual bukan basis kas tapi secara mendetail mereka tidak tahu karena bukan mereka yang memegang aplikasinya kemungkinan yang mengetahui itu yang memegang pelaporan.</p>
<p>Mu : <i>Apa perbedaan aplikasi basis akrual yang diterapkan saat ini dengan aplikasi yang diterapkan sebelumnya ?</i></p>
<p>An : Untuk penerapan aplikasi. Basis kas artinya saat transaksi uang keluar baru diakui sebagai laporan. Sedangkan basis akrual peristiwa/kejadian baru saja terjadi sudah di akui sebagai pendapatan atau pengeluaran walaupun uang belum diterima/dibayar. Contohnya beban listrik kita sudah pakai tapi belum bayar itu sudah diakui sudah bisa di buat laporan sudah masuk biaya.</p>

<p>Mu : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah tahu dan bisa membedakan antara akuntansi konvensional, akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual ?</i></p>
<p>An : Iya. Namun untuk secara keseluruhan, ada yang tahu ada yang tidak khusus untuk pelaporan sudah tentu tahu membedakan ketiga. Yang mana basis kas dan yang mana basis akrul. Disinilah peran pemerintah menerapkan basis akrual supaya tidak terlalu membebaskan diakhir tahun. Basis akrual artinya datanya sudah valid, contohnya basis kas pemakai listrik untuk bulan ini sudah mau diakui tetapi belum dibukukan nanti keluar uang kas baru diakui sebagai pengeluaran.</p>
<p>Mu : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan telah mengikuti pelatihan khusus dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA ?</i></p>
<p>An : Iya. Ada diklat pelatihan khususnya.</p>
<p>Mu : <i>Sudah berapa kali bapak ikut diklat/pelatihan itu ?</i></p>
<p>An : Diklat khusus di Makassar satu kali, kemudian diklat yang di adakan oleh perbendaharaan kurang lebih dua kali untuk secara resminya.</p>
<p>Mu : <i>Bentuk kegiatan dari pelatihan itu seperti apa pak ?</i></p>
<p>An : Sebelum pelatihan kita harus tahu materinya dulu kemudian penerapannya ke aplikasi. Artinya kita harus memahami apa itu SAIBA, apa-apa materi/teori di dalam SAIBA kita pelajari baru kemudian kita simulasi kedalam contoh dan langsung terjun langsung ke aplikasinya. Pada saat proses pelatihan berlangsung kita akan diberikan contoh laporan sebutlah laporan yang dimaksud itu laporan realisasi SPM atau pendapatan (transaksi) baru kita input ke aplikasinya.</p>
<p>Mu : <i>Untuk instrukturnya sendiri pak di datangkan dari pusat atau gimana pak ?</i></p>
<p>An : Ohh iya, instrukturnya langsung dari perbendaharaan keuangan karena aplikasi SAIBA dari kementerian keuangan jadi yang lebih tahu dari orang-orang dari perbendaharaan.</p>
<p>Mu : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA ?</i></p>

<p>An : Kurang lebih haruslah. Sebenarnya sebelum ikut pelatihan, kita harus tahu mengoperasikan aplikasi SAIBA, bisa dengan belajar sendiri atau belajar dengan teman. Apalagi didukung teknologi saat ini yang semakin canggih selain itu kita juga bisa belajar dengan teman yang lebih tahu tentang aplikasi tersebut.</p>
<p>Mu : <i>Apakah sub bagian keuangan merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA ?</i></p>
<p>An : Iya, harusnya terbantu karena penerapan basis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA artinya pelaporan memudahkan untuk membuat laporan keuangan.</p>
<p>Mu : <i>Adakah manfaat yang bisa di petik langsung atau bentuk kemudahan yang diperoleh dari penggunaan aplikasi SAIBA ?</i></p>
<p>An : Bentuk kemudahan yang dimaksud adalah apabila kita ingin melihat laporan operasional kita bisa langsung melihatnya secara terinci bahkan jenis-jenis realisasinya LO nya berapa akan nampak secara mendetail. Artinya begini manfaatnya itu kayak kita hanya butuh LO kita bisa cari LO saja munsul semua list di LO, neraca kita bisa langsung melihat neraca, dan LRA selain itu untuk semua laporan sudah memiliki menu transaksinya masing-masing. Ya sangat terbantulah.</p>
<p>Mu : <i>Bagaimana infrastruktur jaringan pada kantor ini, apakah bisa dikategorikan baik ?</i></p>
<p>An : Kalau jaringan internetnya untuk sementara bisa dikategorikan baik. Akan tetapi kalau untuk aplikasi SAIBAnyanya sendiri, tanpa jaringan secara online juga bisa di operasikan karena untuk pembuatan laporan keuangannya dilakukan secara komputerisasi dan bukan online. Kecuali pelaporan e-monitoring memang infranstruktur itulah yang dibutuhkan karena berbasis web/internet.</p>
<p>Mu : <i>Bagaimana infrastruktur teknologi informasi yang tersedia, apakah memungkinkan untuk menerapkan basis akrual ?</i></p>
<p>An : Untuk teknologi informasi, selama komputernya dalam keadaan baik maka bisa dikatakan baik. Untuk yang satu ini untuk tergantung pada komputernya, kalau komputernya baik maka bisa bisa dikatakan baik.</p>

Untuk aplikasi SAIBA di instal manual di komputer dan tidak ter-link ke web/internet. Aplikasi saiba itu datangnya dari Kementerian melalui KPPN/Perbendaharaan karena pertanggung jawaban kita kan langsung ke Kementerian melalui KPPN.

Mu : Sejauhmana sistem akuntansi komputersasi yang digunakan, perihal penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?

An : Selama komputernya bagus, SDM nya bisa mengerti mengolah data itu maka bisa dikatakan baik. Sementara ini tidak ada kendala yang berarti.

Mu : Sejauhmana penggunaan aplikasi yang digunakan untuk mengelolah keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?

An : Untuk aplikasinya pastilah dikatakan baik. Setiap aplikasikan masing-masing punya kebutuhan begitu pula dengan SAIBA kebutuhan untuk membuat pelaporan. Hasil dari masing-masing penggunaan aplikasi ada. Karena sampai saat ini saya belum melihat bahwa hasil laporan dari aplikasi ini memiliki kendala yang berarti baik itu SAIBA, SIMAK, SAS maupun aplikasi lainnya.

Mu : Sampai saat ini sejauhmana tingkat pemahaman pegawai sub bagian keuangan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual ?

An: Kalau sampai saat ini proses penerapan akuntansi berbasis akrual memang berjalan lancar.

Mu : Bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh pegawai sub bagian keuangan mengenai penggunaan aplikasi berbasis akrual ?

An : Kami sudah pakai secara full karena kami sudah memakai basis akrual karena kalau mau kembali menggunakan basis kas sudah tidak ada aplikasi yang menggunakan aplikasi kas sudah tidak ada.

Mu : Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada kantor ini pak ?

An : Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, sudah berjalan dengan baik dan lancar.
Mu : <i>Apa bukti kalau memang penerapannya berjalan baik dan lancar, pada kantor ini pak ?</i>
An : Bukti bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menerapkan basis akrual yaitu dengan di terapkan/digunakannya aplikasi SAIBA untuk pelaporan keuangan. Aplikasi SAIBA sudah berbasis akrual karena itu merupakan nama aplikasi dari suatu sistem yaitu Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA).
Mu : <i>Terima kasih atas informasinya pak, dan maaf karena sudah banyak menyita waktu bapak.</i>
An : Oh Iya tidak apa-apa, silahkan bertanya kalau ada lagi yang ingin ditanyakan.
Mu : <i>Oh iya pak, terima kasih saya rasa ini sudah lebih dari cukup.</i>
An : Iya sama-sama.

Transkrip Wawancara Antara Peneliti (Mu) Dengan Informan (Eko)
Hari Kamis Tanggal 04 Mei 2017

Mu : *Assalamualaikum pak maaf mengganggu waktunya, saya Mutmainna mahasiswa unismuh yang sedang melakukan penelitian di sini terkait penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada kantor ini pak.*

Eko : Iya. Ada yang bisa saya bantu ?

Mu : *Begini pak. Ini terkait sistem akuntansi terkomputerisasi ?*

Eko : Ohh... tentang sistem akuntansi. Kalau berbicara tentang itu, memang sistem akuntansi disini dilakukan secara terkomputerisasi.

Mu : *Jadi kalau dilakukan secara komputerisasi berarti dalam mengerjakan proses akuntansi dari awal hingga pembuatan laporan keuangan juga dilakukan secara terkumputerisasi ?*

Eko : Iya. Setiap pembuatan laporan keuangan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sudah dilakukan secara komputerisasi dimulai dari awal pencairan dari bendahara di muat kedalam aplikasi SPM, setelah itu keluar SP2D nya tentang pencairan dana kemudian dilaporakan di SAIBA.

Mu : *Apakah seluruh pegawai sub bagian keuangan diwajibkan untuk mampu mengoprasikan jenis aplikasi ter komputerisasi pada Kantor Otoritas Pelabuhan ?*

Eko : Iya, tetapi tergantung dengan tupoksi dan tanggung jawab mereka saja.

Mu : *Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah mengetahui betul mengenai basis akrual apa yang di terapkan pada kantor OP ?*

Eko : Sudah tahu. Karena kami yang kelola aplikasinya, kami yang buat laporannya sudah pasti kami tahu bahwa saat ini basis akrual yang di terapkan pada kantor OP Makassar saat ini.

Mu : *Ada berapa aplikasi yang gunakan untuk mengelolah keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?*

Eko : Pada kantor ini, aplikasi untuk mengelola keuangan ada 3 jenis, seperti : pengeluaran, penerimaan dan materil. Kalau di pengeluaran aplikasi yang digunakan namanya aplikasi SAS, kemudian di penerimaan menggunakan aplikasi berbasis internet nama aplikasinya SIMPONY, kemudian di bendahara materil menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan persediaan.

Mu : *Dalam penggunaan aplikasi yang dikatakan sebelumnya, apakah pegawai sub bagian keuangan mengetahui aplikasi-aplikasi apa yang dimaksud tersebut ?*

Eko : Iya. Karena setiap pegawai memiliki tupoksinya masing-masing, tidak terlepas dari aplikasi apa yang kita tangani yang tentunya menjadi tanggung jawab kita sebagai operator.

Mu : *Apa perbedaan aplikasi basis akrual yang diterapkan saat ini dengan aplikasi yang diterapkan sebelumnya ?*

Eko : Aplikasi berbasis akrual itu adalah aplikasi mengakui seluruh entitas pelaporan keuangan termasuk di dalamnya piutang, atau ada pelaporan yang akan masuk tapi pada saat ini belum masuk itu sudah diakui secara akrual. Sedangkan basis kas itu mengakui apa yang ada pada saat itu, itulah yang di laporkan.

Mu : *Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah tahu dan bisa membedakan antara akuntansi konvensional, akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual ?*

Eko : Iya. Karena rata-rata latar belakang pendidikan kami disini dari ekonomi. Kalau bicara personal saya tahu akan tetapi kalau untuk keseluruhan pegawai saya tidak tahu, apakah mereka bisa membedakannya atau tidak. Namun semestinya tahu membedakan ketiga hal tersebut, karena kita disini bergerak di bidang keuangan.

Mu : *Apakah pegawai sub bagian keuangan telah mengikuti pelatihan khusus dalam mengoprasian aplikasi SAIBA ?*

<p>Eko : Iya. Kalau saya sudah tiga kali mengikuti diklat (Dimtek). Diklatnya sendiri pernah diadakan oleh instansi kita sendiri, selain itu pernah juga diadakan oleh keuangan.</p>
<p>Mu : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA ?</i></p>
<p>Eko : Mengenai keterampilan dan keahlian ya, tentu saja kami sudah memiliki keduanya. Sebab kita disini sudah ikut serta dalam pelatihan beberapa kali selain itu berbekal dari aplikasi sebelumnya diterapkan (aplikasi SAKPA) yang pengoprasiaannya tidak jauh berbeda dengan aplikasi yang saat diterapkan (aplikasi SAIBA).</p>
<p>Mu : <i>Apakah sub bagian keuangan merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA ?</i></p>
<p>Eko : Iya merasa terbantu sekali. Sebab kita bisa mengetahui apa-apa saja entitas yang sudah menjadi hak kita walaupun belum kita terima contohnya piutang adalah pengembalian belanja.</p>
<p>Mu : <i>Terima kasih atas informasinya pak, dan maaf karena sudah banyak menyita waktu bapak.</i></p>
<p>Eko : Oh Iya tidak apa-apa, sempat masih ada yang ingin ditanyakan.</p>
<p>Mu : <i>Terima kasih, saya rasa ini sudah lebih dari cukup.</i></p>
<p>Eko : Sama-sama.</p>